LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kinerjaku

Ekinerja

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Kata Pengantar ii
Ikhtisar Eksekutif iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas dan Fungsi 2
1.3 Kondisi SDM dan Struktur Organsasi PPN Brondong 3
1.4 Peran Strategis PPN Brondong 4
1.5 Sistematika Laporan 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis 6
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 11
3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 55
3.3 Realisasi Anggaran 56
BAB IV PENUTUP 57
Lampiran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran program dan indikatir kinerja PPN Brondong Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja PPN Brondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabiltas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang memiliki manfaat sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi kepada masyarakat, serta sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja pegawai di lingkungan PPN Brondong. Kinerja PPN Brondong diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan PPN Brondong dalam mewujudkan *Good Govermance* dan *Clean Government*.

Lamongan, 05 Januari 2024

Kepala Pelabuhan

Ibrahim, A.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

PPN Brondong pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi awal anggaran sebesar Rp. 17.081.392.000,- dan dilakukan penyesuaian sehingga anggaran akhir menjadi Rp. 16.153.666.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 16.094.483.330,- atau (99,63%). Secara kinerja PPN Brondong mendapatkan Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,79 kategori **Istemewa**, hal ini didukung oleh tercapainya 18 capaian indikator kinerja.

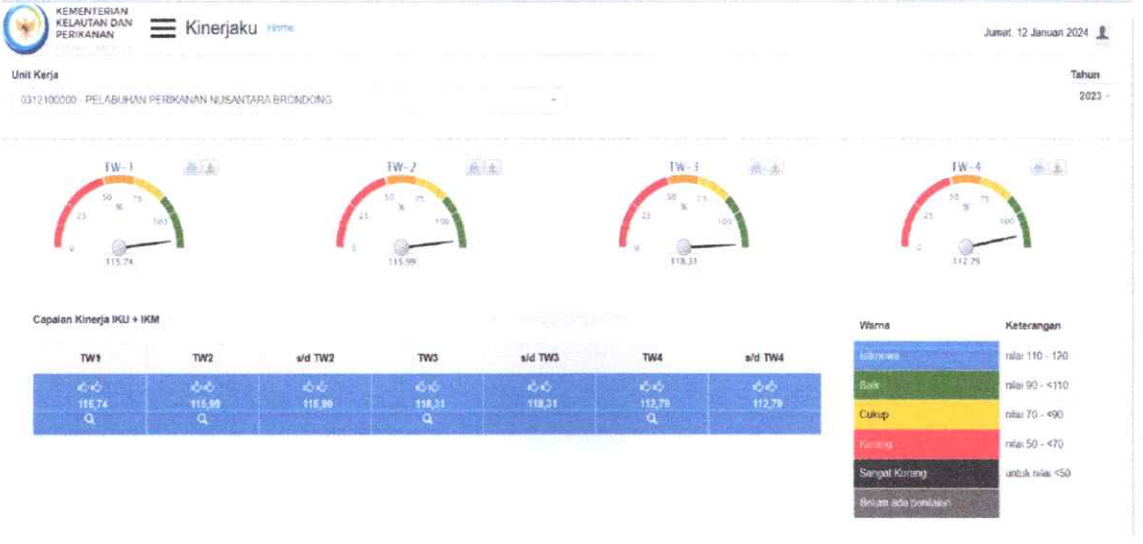

Gambar 1. Tampilan Dasborad Kinerjaku PPN Brondong

Capaian kinerja PPN Brondong Tahun 2023 dipengaruhi oleh adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen di PPN Borndong serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam meningkatkan kinerja kedepan dipandang perlu ketersediaan SDM yang berkompeten dan sesuai dengan beban kerja di PPN Brondong, serta ketersediaan sarana dan prasana yang sesuai dengan kebutuhan kinerja.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tercapainya ujuan pembangunan perikanan tangkap, PPN Brondong melaksanakan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan.
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI).
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara aknutabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni :

1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan

2) Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja PPN Brondong yang disusun setiap tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja PPN Brondong Tahun 2023 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2023 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab bisa diwujudkan.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Tugas PPN Brondong adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPN Brondong menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan, pemantuan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book* penangkapan ikan;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;

10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Kondisi SDM dan Struktur Organisasi PPN Brondong

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPN Brondong di dukung oleh 72 orang pegawai yang terdiri atas PNS 47 orang (65,27%), PPPK 19 orang (16,67%) dan PPNPN 11 orang (18,06%). Komposisi pegawai di PPN Brondong pada tahun 2023 berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Komposisi Pegawai Di PPN Brondong Pada Tahun 2023
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Status	Golongan/Jenis Kelamin								Jumlah		
	I		II		III		IV				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
PNS	-	-	8	3	22	13	1	-	31	16	47
PPPK	-	-	9	3	4	3	-	-	13	6	19
PPNPN	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
Jumlah	11	-	17	6	26	16	1	-	55	22	77

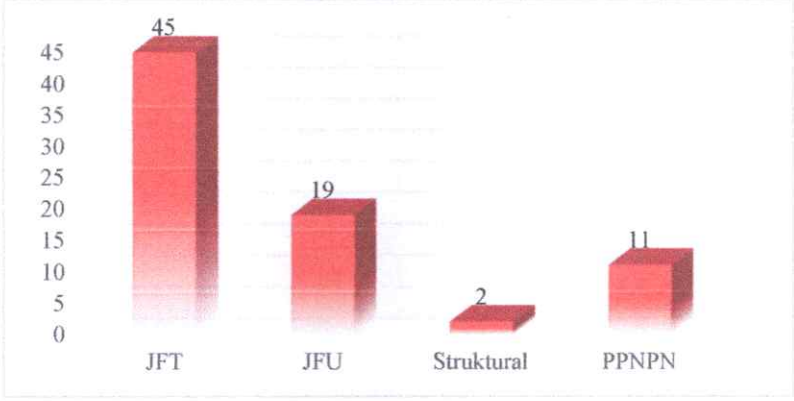

Gambar 2. Grafik Komposisi Pegawai PPN Brondong
Tahun 2023 Berdasarkan Jabatan

Susunan organisasi PPN Brondong terdiri atas:

a. Kepala
b. Subbagian Umum
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

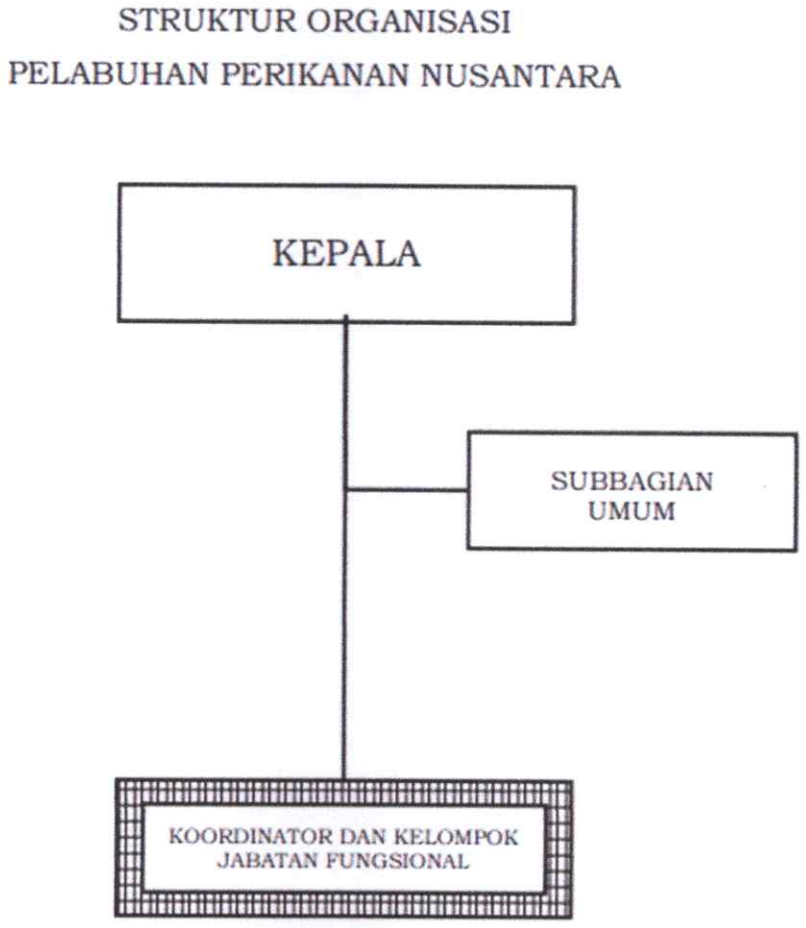

Gambar 3. Stuktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara

1.4. Peran Strategis PPN Brondong

Tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap,
2. Membangun struktur ekonomi perikanan tangkap yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
3. Mencapai lingkungan hidup sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

PPN Brondong sebagai garda terdepan tenttunya mepunyai peran strategis dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan perikanan tangkap melalui dukungan SDM yang berkompeten, anggaran dan dilengkapi sarana prasarana. Dalam melaksanakan perannya, PPN Brondong akan menghadapi tantangan yaitu kondisi kegiatan panangkapan ikan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, dominasi kapal perikanan tradisional dan rendahnya kualitas SDM masyarakat perikanan.

1.5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja PPN Brondong Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja PPN Brondong selama Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) PPN Brondong Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika laporan sebagai berikut:

1) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan capaian kinerja PPN Brondong Tahun 2023.
2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan (PK).
4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
5) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
6) **Lampiran**, berisi Perjajian Kinerja dan data lainnya.

BAB II
RENCANA KINERJA

2.1. Rencana Startegis

Visi PPN Brondong yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong".

Dalam mewujudkan visi diatas, maka PPN Brondong mempunyai 4 (empat) misi yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui penumbuhan kewirausahaan dan fasilitasi akses pendanaan modal bagi nelayan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dengan menyediakan kualitas ikan hasil tangkapan yang memenuhi standar mutu, mewujudkan konektifitas/jejaring antar pelabuhan perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan ikan, dan fasilitasi pelaksanaan revitalisasi industri perikanan tangkap dan penyediaan serta pemanfaatan insfratruktur/fasilitasi pelabuhan perikanan untuk menyonsong Revolusi Industri 4.0

Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan perikanan tangkap yang akurat dan terkini.

Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui reformasi birokrasi PPN Brondong

Dalam mewujudkan tercapainya misi dari PPN Brondong pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Sasaran Program dan 19 Indikator Kinerja sebagaimana pada Tabel 2.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Perjanjian kinerja adalah

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel 2, dan selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada tabel 3:

Tabel 2.
Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja
PPN Brondong Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1.812,70
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	50.530
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	50
4		4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	1

	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	5	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	30
5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang optimal	6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	83
		8	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	1
7	Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	20
8	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1
		11	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan	160
9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	12	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan	75,07
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	75
		14	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	93
		15	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	77,5
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	77,5
		18	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	89
		19	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	82

Tabel 3.
Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja
PPN Brondong Tahun 2023 (Perubahan)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Juta Rupiah)	1.812,70
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	50.530
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing	3	Presentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	83
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	90
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal	6	Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	80
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	30,01
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	50
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9	Presentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	95
7	Tata Kelola Pemerintah yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanandi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	75,07
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75

		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	93
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77,5
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77,5
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	93,75
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	82
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	88,21

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) progran dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.
Alokasi Anggaran PPN Brondong Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan	326.200.000
	Pengelolaan pelabuhan perikanan	2.745.082.000
	Pengelolaan perizinan dan kenelayanan	4.000.000
	Pengelolaan sumber daya ikan	178.050.000
Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.900.334.000
Total		**16.153.666.000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

2.2. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja PPN Brondong Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2023. Capaian kinerja PPN Brondong pada 18 indikator kinerja utama dengan hasil secara keseluruhan tercapai dengan nilai 112,79, dan capaian masing-masing Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Capaian Kinerja PPN Brondong Tahun 2023

Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
S.01		**Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**			120	
	IKS.01.1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Juta Rupiah	1.812,74	2.224,66	120
S.02		**Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Meningkat**			109,02	
	IKS.02.1	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Ton	50.530,00	55.088,00	109
S.03		**Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Berdaya Saing**			108,11	
	IKS.03.1	Persentase Permohonan Pengusahaan yang dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Persen	100	100	100
	IKS.03.2	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Nilai	83	92,56	111,5
	IKS.03.3	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Persen	90	100	111,1
S.04		**Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal**			117	
	IKS.04.1	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Persen	80	92	115
	IKS.04.2	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Nilai	30,01	81,55	120
S.05		**Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**			120	
	IKS.05.1	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	Kapal	50	357	120
S.06		**Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**			105,26	
	IKS.06.1	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	Persen	95	100	105,3
S.07		**Tata Kelola Pemerintah yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**			110,16	
	IKS.07.1	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Nilai	75,07	83,69	111,5
	IKS.07.2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Persen	75	100	120
	IKS.07.3	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Nilai	93	98,68	106,1
	IKS.07.4	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Indeks	80	90,94	113,7
	IKS.07.5	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Persen	77,5	98,35	120
	IKS.07.6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Persen	77,5	85	109,7
	IKS.07.7	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Nilai	93,75	96,78	103,2
	IKS.07.8	Nilai Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Nilai	82	85,47	104,2
	IKS.07.9	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Indeks	88,21	90,92	103,1
S.08		**Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**				
S.09		**Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**				

Berdasarkan capaian kinerja diatas maka dilakukan analisa terhadap pencapaian tersebut sehingga dapat memberikan data yang komprehensif sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk kinerja organisasi ditahun berikutnya. Berikut ini adalah capaian dari masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Brondong Tahun 2023:

S.01 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 01.1. Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Juta Rupiah)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada PPN Brondong terdapat 2 (dua) jenis penerimaan yaitu pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan.

Jenis PNBP yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:

1. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tusi Pelabuhan Perikanan Klaster 1;
2. Bangunan Permanen;
3. Pemeliharaan Prasarana;
4. Penumpukan Barang Terbuka Tidak Beratap;
5. Ruang Pertemuan/Aula AC Kapasitas 51 s.d 100 Orang;
6. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin;
7. Penggunaan ABF (*Frezeer*);
8. Pelayanan Tangki Air dan Instalasinya; dan
9. Pelayanan Transportasi - Crane Truck.

Jenis PNBP yang berasal dari jasa pelabuhan perikanan yaitu:

1. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>30 - 100 GT);
2. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>5 - 30 GT);
3. Pemakaian Listrik yang Bersumber dari Daya milik PLN melalui Instalasi milik Pelabuhan Perikanan;
4. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari PDAM yang Dialirkan Melalui Pipa Dermaga/TPI;
5. Pelayanan bengkel;
6. Pelayanan jasa pas masuk harian;
7. Pelayanan jasa pas masuk berlangganan; dan
8. Pelayanan jasa kebersihan kolam pelabuhan, pertokoan/perkantorn, rumah makan kios, dan bangunan permanen tertutup.

Pengukuran capaian indikator kinerja "Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" sesuai dengan manual IKU yaitu "Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan". Capaian Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023 sebesar Rp. 2.224.665.683 yang terdiri dari:

1. Pendapatan penggunaan sarana dan prasaran sesuai dengan tusi (425151) sebesar Rp. 743.312.222.
2. Pendapatan jasa pelabuhan perikanan (425621) sebesar Rp. 1.481.353.461.

Tabel 6.
Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKU	Target	Realisasi	%
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Juta Rupiah)	1.812,74	2.224,66	122,73

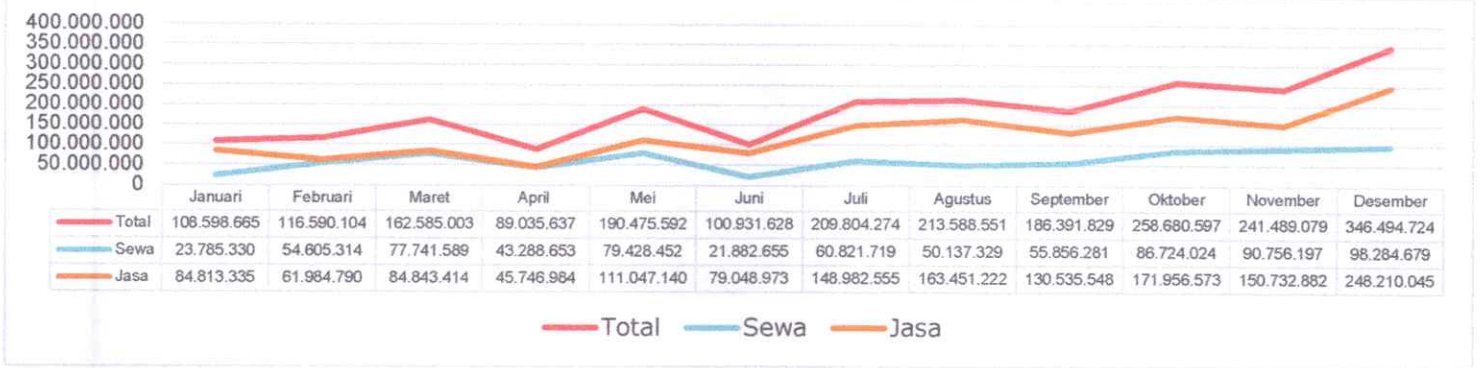

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Total	108.598.665	116.590.104	162.585.003	89.035.637	190.475.592	100.931.628	209.804.274	213.588.551	186.391.829	258.680.597	241.489.079	346.494.724
Sewa	23.785.330	54.605.314	77.741.589	43.288.653	79.428.452	21.882.655	60.821.719	50.137.329	55.856.281	86.724.024	90.756.197	98.284.679
Jasa	84.813.335	61.984.790	84.843.414	45.746.984	111.047.140	79.048.973	148.982.555	163.451.222	130.535.548	171.956.573	150.732.882	248.210.045

Gambar 5. Grafik Realisasi PNBP Non SDA Per Bulan di PPN Brondong 2023

Tabel 7.
Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Rp)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
2.576.678.784	2.224.665.683	- 352.013.101	13,66

Gambar 6. Grafik Trend Target dan Realisasi PNBP Non SDA di PPN Brondong Tahun 2020 - 2023

Berdasarkan pada tabel 6 diatas maka realisasi PNBP Non SDA pada PPN Brondong Tahun 2023 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1.812,74 Juta Rupiah dengan realisasi 2.224,66 Juta Rupiah atau 122,73%. Dibandingkan periode sebleumnya yaitu Tahun 2022, capaian realisasi PNBP Non SDA di PPN Brondong mengalami penurunan sebesar 13,66% atau Rp. 352.013.101. Realisasi PNBP Non SDA selama Tahun 2020 – 2024 mempunyai trend positif 34, 44% yang berarti setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp. 396.206.500.

Tercapainya realisasi PNBP Non SDA pada Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah operasional yang dilaksanakan meliputi:

1. Melakukan identifkasi potensi-potensi kegiatan yang dapat menunjang peningkatan PNBP Non SDA di PPN Brondong.
2. Pembinaan terhadap stakeholder di PPN Brondong tentang sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Melakukan optimalisasi pada kegiatan pas masuk dengan memberlakukan pelayanan 24 jam.
4. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas PPN Brondong.
5. Peningkatan kompetensi petugas pengelola PNBP.

Hambatan yang terjadi sehingga menyebabkan penurunan realisasi PNBP Non SDA Tahun 2023 disebabkan berkurangnya volume ikan yang disimpan pada ruang pendingin atau *Cold Storage* PPN Brondong dibandingkan Tahun 2022. Dalam meningkatkan kembali realisasi PNBP Non SDA di PPN Brondong pada periode berikutnya maka perlu dilakukan langkah-langkah operasional sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kembali terhadap potensi PNBP Non SDA di PPN Brondong berdasarkan data aktivitas Tahun 2023.
2. Melakukan inovasi terhadap pelayanan usaha di PPN Brondong.
3. Meningkatkan kelengkapan fasilitas pelabuhan perikanan sesuai dengan kebutuhan usaha pengguna jasa.
4. Melakukan publikasi secara intens tentang potensi usaha dan keragaan operasinal pelabuhan perikanan di PPN Brondong.

S.02 Produktivitas Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Meningkat

IKS 02. 1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)

Produksi perikanan tangkap mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan. Produksi yang dimaksud adalah semua hasil yang diperoleh, baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah. Volume produksi perikanan tangkap pada PPN Brondong merupakan hasil penangkapan ikan yang berasal dari laut oleh kapal penangkap ikan dan didaratkan di PPN Brondong. Tahapan dalam memperoleh volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong dimulai dari kegiatan pengumpulan data produksi oleh enumerator setiap hari dengan melakukan pencatan secara langsung hasil tangkapan setiap kapal perikanan yang mendaratkan ikan di PPN Brondong. Selanjutnya dilakukan pengolahan data oleh petugas pengelola data dengan merekapitulasi data enumerator sehingga diperoleh data volume produksi perikanan tangkap yang telah divalidasi internal. Metode pengukuran capaian kinerja dengan

membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada Tahun 2023, volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong sebesar 55.088 ton.

Tabel 8.
Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	50.530	55.088	109,02

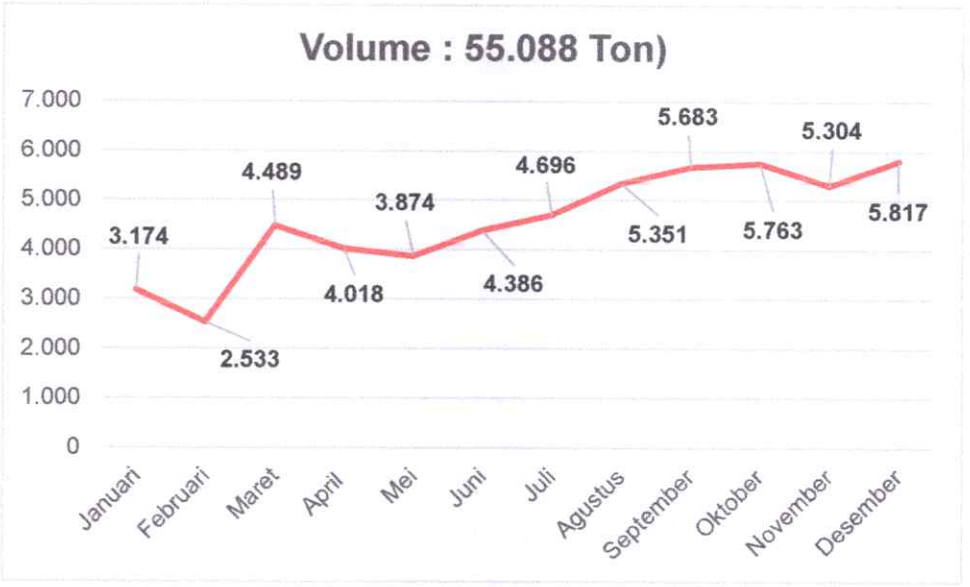

Gambar 7. Grafik Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap Per Bulan di PPN Brondong 2023

Gambar 8. Grafik Trend Target dan Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Brondong Tahun 2020 - 2023

Tabel 9.
Perbandingan Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap
dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Ton)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
56.225	55.088	- 1.137	2,02

Berdasarkan tabel 8 diatas, diketahui bahwa volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong Tahun 2023 sebesar 55.088 ton atau 109,02% dari terget sebesar 50.530ton. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 56.225 ton maka capaian volume produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 2,02% atau 1.137 ton. Pada periode Tahun 2020-2023, volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong mempunyai trend negatif sebesar 0,58% atau setiap tahunnya akan terjadi penurunan produksi sebesar 334 ton.

Langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan pencapaian IKU "Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" meliputi:

1. Metode pengambilan data dengan sistem sensus dengan melakukan pengambilan data produksi terhadap seluruh kapal perikanan yang melakukan pembongkaran ikan di PPN Brondong.
2. Peningkatan kompetensi dan jumlah petugas pengambil data (*enumerator*).

Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu masih dilakukan secara manual dengan melakukan wawancara terhadap nakhoda dan informasi yang didapatkan masih dalam perkiraan. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kegiatan perikanan di PPN Brondong yang masih tradisional tanpa adanya pencatan data oleh pemilik atau nakhoda terhadap hasil tangkapan ikan serta rantai distribusi yang kompleks. Sedangkan terjadi penurunan volume produksi perikana tangkap pada Tahun 2023 disebabkan karena semakin jauhnya daerah penangkapan ikan sehingga memperpanjang jumlah hari penangkapan yang berakibat menurunya jumlah kapal perikanan yang melakukan pembongkaran serta stock sumberdaya ikan yang cenderung menurun di perairan Laut Jawa.

Dalam rangka meningkatkan akurasi pendataan produksi perikanan tangkap di PPN Brondong perlu dilakukan dengan melakukan pengembangan sistem pendataan dan pengolahan data yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan pengunaan Informasi Teknologi (IT). Selanjutnya melakukan peningkatan kompetensi petugas

pengambil data dan pengolah data serta meningkatkan komunikasi dengan para pemilik kapal. Nakhoda, dan pemangku kepentingan.

S.03 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing

IKS 03. 1. Presentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Pelabuhan perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :08/MEN/2012 memiliki 2 fungsi yaitu sebagai fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan yaitu melakukan pembinaan dan pengolahan, melakukan pengumpulan data dan publikasi, melaksanakan fungsi karantina ikan, serta tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, melaksanakan kegiatan kapal perikanan, melakukan publikasi hasil pelayanan sandar dan labuhn kapal perikanan dan kapal penelitian kelautan dan perikanan, melakukan pemantauan dan pengendalian lingkungan, dan melaksanakan kesyahbandaran, kepabeanan, dan/atau keimigrasian. Sedangkan fungsi pengusahaan, pelabuhan sebagai pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, bongkar muat ikan, pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, serta logistik dan perbekalan kapal pemasaran dan distribusi ikan, pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan, penyediaan jasa kelautan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan fungsi pengusahaan terutama dalam pemanfaatan fasilitas dan lahan di Pelabuhan Perikanan perlu dilakukan proses analisa atau evaluasi terhadap permohonan pengusahaan dalam rangka menghindari resiko yang terjadi kedepannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2023 jumlah permohona yang masuk sebanyak 84 berkas dengan hasil analisa dan/atau evalusi 70 berkas sesuai dan 14 berkas belum sesuai sebagaimana disajikan pada tabel 11.

Tabel 10.
Target dan Realisasi Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (%)	100	100	100

Tabel 11.
Data Permohonan Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Tahun 2023

Bulan	Permohonan	Hasil Analisa/Evaluasi	
		Sesuai	Tidak Sesuai
Januari	1	1	0
Februari	13	12	1
Maret	8	8	0
April	17	14	3
Mei	10	10	0
Juni	8	7	1
Juli	1	0	1
Agustus	5	4	1
September	6	3	3
Oktober	4	4	0
November	4	4	0
Desember	7	3	4
Total	**84**	**70**	**14**

Tabel 12.
Perbandingan Realisasi Presentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (%)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
N/A	100		

Tabel 13.
Perbandingan Realisasi Presentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi dengan Periode RPJM

Realisasi (%)			
2020	2021	2022	2023
N/A	N/A	N/A	100

Berdasarkan tabel 10 diatas, diketahui bahwa presentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi pada Tahun 2023 di PPN Brondong sejumlah 100% atau seluruh permohonan dilakukan analisa dan/atau evaluasi. Permohonan yang sesuai selanjutnya diterbitkan rekomendasi persetujuan dan diajukan persetujuan prinsip ke Direktorat Kepelabuhan Perikanan sebagai dasar penerbitan kontrak pemanfaatan fasilitas atau lahan di PPN Brondong. Sedangkan permohonan yang belum sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali terhadap kekurangannya. Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan berdasarkan perubahan IKU PPN Brondong Tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap

periode sebelumnya maupun jangka menengah.

Langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan pencapaian IKU "Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" meliputi:

1. Proses bisnis pelayanan usaha yang sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Pembinaan pengguna jasa terhadap proses pemanfaatan fasilitas dan lahan yang digunakan agar sesuai dengan peruntukannya dan tidak salah gunakan.

Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pengusahaan yaitu rendahnya kepedulian pengguna jasa di PPN Brondong dalam memenuhi kewajiban sesuai dalam surat perjanjian penggunaan bangunan dan/atau lahan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan usaha di PPN Brondong maka perlu adanya kegiatan pembinaan yang intensif dan berkala kepada pengguna jasa. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan/atau lahan melalui penataan kembali kegiatan pengusahaan serta melakukan monitoring dan evlauasi secara berkala terhadap ketaatan pelaku usaha yang memanfaatkan bangunan dan/atau tanah di PPN Brondong.

IKS 03. 2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Pelabuhan perikanan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam pemenuhan fasilitas maupun pelayanan yang merupakan indikator/ parameter bagi keberhasilan capaian kinerja pelabuhan perikanan. Kinerja operasional pelabuhan perikanan berkaitan dengan segala aktivitas operasional yang ada di pelabuhan perikanan mulai dari praproduksi, produksi, pengoJahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumber daya ikan. Tingkat kinerja operasional pelabuhan perikanan didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional sesuai dengan kelas pelabuhan perikanan yang terdiri : a) administrasi dan sistem informasi, b) fasilitas pelabuhan perikanan, c) pelayanan umum, dan d) investasi dan industri. Capaian indikator tingkat kinerjal Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023 sebesar 92,56 dengan kategori **Sangat Baik**.

Tabel 14.
Target dan Realisasi Tingkat Kinerja
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	83	92,56	111,51

Gambar 9. Grafik Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

Tabel 15.
Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Nilai)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
92,16	92,56	+ 0,40	0,43

Gambar 10. Grafik Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 - 2023

Berdasarkan tabel 14 diatas, diketahui bahwa capaian IKU "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" Tahun 2023 sebesar 92,56 atau 111,51% dari target yang ditetapkan sebesar 83. Dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya

terdapat kenaiakan sebesar 0,40 atau 0,43% dimana capaian periode sebelumnya sebesar 92,16. Pada perode Tahun 2020-2023, tingkat kinerja operasional PPN Brondong menunjukkan tren yang positif dengan kenaikan rata-rata pertahun 2,80.

Langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan pencapaian IKU "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" meliputi:

1. Peningkatan kompetensi para operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dalam melakukan entry data sesuai dnegan ketentuan.
2. Dilakukan monitoring secara berkala oleh Tim Operasional Pelabuhan terhadap capaian laporan evaluasi kinerja.
3. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar tim kerja dalam pemenuhan data pada kinerja operasinal pelabuhan sesuai dengan tugas dan fungsi tim kerja.

Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan kinerja pelabuhan perikanan yaitu belum optimalnya kegiatan pendataan penyaluran logistik kapal perikana yang berkisar pada 50% dari kebutuhan logistik kapal perikanan di PPN Bronodng. Selain itu juga belum optimalnya pelayanan kedatangan kapal perikanan disebabkan karena perijinan. Langkah-langkah yang diambil guna meningkatkan capaian kinerja PPN Brondong kedepannya melalui peningkatan kompetensi petugas serta membangun komunikasi yang efektif antar tim kerja lingkup PPN Brondong.

IKS 03. 3. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang yaitu: (1) mengatur kedatangan kapal perikanan, (2) memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, (3) menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, (4) mengatur keberangkatan kapal perikanan, (5) menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkapan Kapal Perikanan, (6) menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, (7) memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, (8) memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut, (9) memeriksa log book penangkapan ikan, (10) mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, (11) mengawasi pemanduan, (12) mengawasi pengisian bahan bakar, (13) mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, (14) melaksanakan bantuan

pencarian dan penyelamatan, (15) memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, (16) mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, (17) pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan, dan (18) memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Dalam mengukur tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPN Brondong pada Tahun 2023 melalui 3 (tiga) indikator pelayanan adminstrasi pada tugas dan wewenang sayhbandar di pelabuhan perikanan yang meliputi: (1) jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), (2) jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), dan (3) jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Persentase tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPN Brondong mencapai 100% yang menunjukan bahwa secara keseluruhan PPN Brondong sudah menyelengaran pelayanan pada SPB, STBLK, dan SHTI sebagaimana tersaji pada data tabel 17.

Tabel 16.
Target dan Realisasi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	90	100	111,11

Tabel 17.
Data Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

Bulan	SPB	STBLKK	SHTI
Januari	2	2	20
Februari	11	11	8
Maret	26	26	22
April	21	21	14
Mei	40	40	10
Juni	51	51	13
Juli	59	59	17
Agustus	25	25	21
September	29	29	21
Oktober	46	46	33
November	54	54	44
Desember	76	76	18
Total	**440**	**440**	**241**

Tabel 18.
Perbandingan Realisasi Pelayanan Kesyahbandaran dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (%)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
N/A	100		

Tabel 19.
Perbandingan Realisasi Pelayanan Kesyahbandaran Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (%)				Selisih (+/-)	%
2020	2021	2022	2023		
N/A	N/A	N/A	100		

Berdasarkan tabel 16 diatas, diketahui tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPN Brondong Tahun 2023 mencapai 100% atau 111,11% dari target 90%. Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan berdasarkan perubahan IKU PPN Brondong Tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap periode sebelumnya maupun jangka menengah.

Langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan pencapaian IKU "Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" yaitu melakukan pelayanan kesyahbandaran pada kapal perikanan yang beraktivitas pada pelabuhan perikanan binaan disekitar PPN Brondong seperti PP. Kranji. Hambatan yang dihadapi dalam pelayanan kesyahbandaran di PPN Brondong adalah kondisi kapal perikanan yang belum memiliki dokumen perijinan, terbatasnya ketersediaan petugas yang memiliki kompetensi kesyahbandaran dan berlaratar belakang pendidikan Nautika atau Teknik kapal perikanan. Dalam menunjang terlaksananya pelayanan kesyahbandaran yang optimal diperiode selanjutnya, maka akan dilakukan pelayanan kesyahbandaran dengan prioritas pelabuhan perikanan pangkalan PIT di wilayahn kerja PPN Brondong.

S.04 Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal

IKS 04. 1. Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Pengembangan aktivitas atau usaha perikanan di pelabuhan perikanan sering tidak diimbangi dengan pengembangan fasilitasnya sehingga menghambat terlaksananya aktivitas pelabuhan perikanan secara optimal. Pengembangan fasilitas ini penting

dilaksanakan agar aktivitas dapat dilakukan secara optimal. Sarana dan prasarana yang ada terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu fasilitas pokok yang merupakan fasilitas utama yang harus ada di Pelabuhan Perikanan, fasilitas fungsional untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional, dan fasilitas penunjang yang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada PPN Brondong terdapat 2 (dua) jenis perimanaan yaitu pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan. Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PPN Brondong berdasarkan pada dokumen masterplan Tahun 2012 .

Tabel 20.
Target dan Realisasi Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong(Persen)	80	92	115

Tabel 21.
Perbandingan Realisasi Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (%)		**Selisih (+/-)**	**%**
2022	**2023**		
N/A	100		

Tabel 22.
Perbandingan Realisasi Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (%)				Selisih (+/-)	%
2020	2021	2022	2023		
N/A	N/A	N/A	100		

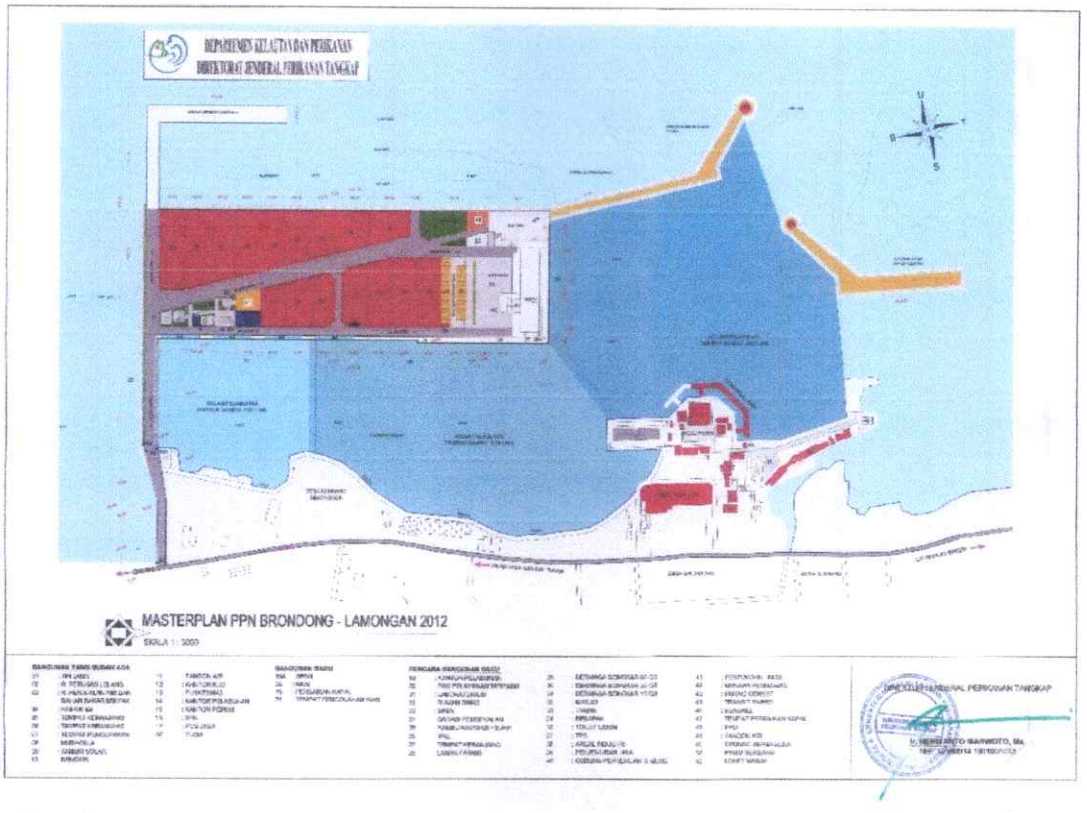

Gambar 11. Masterplan PPN Brondong

Berdasarkan tabel 20 diatas, diketahui persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPN Brondong pada Tahun 2023 mencapai 92% atau 115% dari target 80%. Capaian tersebut didapatkan dari jumlah 53 fasilitas yang tercantim pada masterplan dengan kondisi jumlah ekstising fasilitas yang sudah tersedia berjumlah 49. Fasiltas yang belum dilakukan pembanguan meliputi (1) menara pengawas, (2) transit sheed, (3) pos pelayana terpadu, dan (4) gedung serba guna. Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan berdasarkan perubahan IKU PPN Brondong Tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap periode sebelumnya maupun jangka menengah.

Langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan pencapaian IKU "Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" yaitu melakukan melakukan identifkasi secara berkala terhadap ketersedian

dan kondisi fasilitas pokok, penunjang dan fungsional di PPN Brondong yang selanjutnya sebagai bahan perencanaan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan perikanan. Pengembangan fasilitas juga dilakukan berdasarkan akan kebutuhan terkini dari PPN Brondong sehingga tidak selalu berpatokan pada masterplan karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Pada Tahun 2023 telah dilakukan pengembangan fasilitas berupa (1) rehabilitasi tempat bongka muat pada PPDI, (2) pembangunan tempat parkir roda 2 / motor, dan (3) pembanguan tempat perbaikan jaring. Pada Tahun 2024 telah direncanakan pembangunan jalan outlet pengepakan ikan, pembangunan mess operator dan rehabilitasi kantor PPN brondong guna tersedia ruang pelayanan terpadu sesuai ketentuan pelayanan prima.

IKS 04. 2. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Dalam kegiatan operasional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dianggap perlu untuk ditinjau mengenai aspek lingkungan hidup sebagai kendali terhadap prakiraan terjadinya dampak pencemaran lingkungan dan perubahan di berbagai aspek, antara lain : aspek fisika-kimia (seperti : penurunan kualitas udara ambient, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas air laut, peningkatan air larian); aspek biologi (seperti : gangguan biota air); dan aspek sosial ekonomi dan budaya (seperti : gangguan lalu lintas darat, gangguan lalu lintas perairan, peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha, perubahan persepsi masyarakat, timbulan limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun) yang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengelolaan bekerjasama dengan pihak instansi atau pihak terkait yang dilakukan secara rutin dan periodik melaksanakan pemantauan langsung ke lapangan untuk menguji baku mutu kandungan parameter perihal kegiatan tersebut.

SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan. Pada Tahun 2023 skore PPN Brondong dalam pelaksanaan program lingkungan hingga pencapaian kualitas lingkungan sebesar 88,55 dengan kategori **Sangat Baik**.

Tabel 23.
Target dan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan
di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	30,01	81,55	271,74

Gambar 12. Dashboard Selaraskan PPN Brondong

Tabel 24.
Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Nilai)		**Selisih (+/-)**	**%**
2022	**2023**		
N/A	81,55		

Tabel 25.
Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (Nilai)				**Selisih (+/-)**	**%**
2020	**2021**	**2022**	**2023**		
N/A	N/A	N/A	81,55		

Berdasarkan tabel 23 diatas, diketahui Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada Tahun 2023 sebesar 88,11 atau 271,74% dari target sebesar 30,01. Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan berdasarkan perubahan IKU PPN Brondong Tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap periode sebelumnya maupun jangka menengah.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, antara lain:

1. Hasil uji laboratorium terhadap kualitas air laut sebagian parameter masih dibawah baku mutu yang ditetapkan, hanya pada parameter total ammonia (NH_3-N) yang mungkin disebabkan karena aktivitas pencucian ikan saat proses pembongkaran serta ditemukannya oil layer yang disebabkan oleh belum tersedianya *oil water separator* pada kapal ikan tradisional;
2. Peningkatan timbulan sampah di kawasan pelabuhan telah berjalan dengan baik, hanya saja perlu adanya program 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi penuhnya tempat pembuangan sampah akhir;
3. Limbah cair di PPN Brondong berasal dari pencucian ikan dan aktivitas pemotongan kepala ikan masih belum dilakukan pengolahan karena IPAL yang ada belum terfungsikan;
4. Perspektif masyarakat dengan adanya operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong positif, dan PPN Brondong selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menerima segala masukan dari semua lapisan *stakeholder* terkait;
5. Kemungkinan terjadinya penurunan kinerja jalan, peningkatan potensi kebakaran dan timbulnya bau telah dilakukan upaya dengan mengoptimalkan petugas keamanan (*security*) dan petugas kebersihan pelabuhan sedangkan untuk aspek kebisingan masih dibawah ambang batas yang ditetapkan;
6. Potensi timbulnya limbah B3 telah diantisipasi dengan menempatkan tempat penampungan sementara limbah B3 yang tersedia di lokasi yang memungkinkan timbulnya limbah B3 seperti oli bekas;
7. Lebih dari 50% pekerja yang ada di kawasan pelabuhan merupakan warga lokal serta kesempatan kerja terbuka bagi siapa saja yang berminat dan untuk menunjang usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong juga menyediakan lahan dan/ atau bangunan yang di sewakan untuk pelaku usaha yang terkait erat dengan aktivitas nelayan di kawasan pelabuhan;
8. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar *stakeholder* di pelabuhan membuat gangguan kantibmas tidak terjadi dan petugas keamanan PPN brondong dibantu

oleh aparat penegak hukum terkait selalu *standby* untuk menjaga kamtibmas di kawasan pelabuhan; dan

9. Adanya program Selaraskan turut membantu kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong khususnya dalam hal monitoring dan evaluasi.

Dalam menunjang kegiatan pengenlaian lingkungan, rencana aksi periode selanjutnya yaitu :

1. Pelaksanan ISO 14001:2015.
2. Melakukan sosialisasi kepada nelayan yang kapalnya beraktivitas di PPN Brondong untuk tidak langsung membuang air got yang mengandung minyak ke kolam pelabuhan.
3. Perlu adanya pencanangan program 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan bank sampah.
4. Reaktivasi IPAL Pelabuhan atau pengelolaan limbah cair sederhana.
5. Terus konsisten menyerap aspirasi, saran dan masukan dari stakeholder dan melakukan perbaikan pada sektor terkait.
6. Menambah sarana penanggulangan kebakaran di kawasan pelabuhan.
7. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 melalui kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan limbah B3 yang sudah di tamping.
8. Sosialisasi secara rutin terkait keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan dan pelarangan peredaran miras dan obat-obatan terlarang yang mungkin menjadi pemicu terjadinya gangguan kamtibmas; dan
9. Menerapkan program selaraskan secara berkelanjutan sebagai bahan monitoring serta evaluasi pengelolaan dan pemantau lingkungan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

S.05 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 05. 1. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)

Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan merupakan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yaitu surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan dalam rangka keselamatan

pelayaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) dengan menggelar gerai pelayanan di setiap daerah. Akselerasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Akselerasi KKP sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan prima diwujudkan dengan menerbitan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.578/MEN-KP/ VII/2022 tentang Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Dalam Masa Transisi, kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan dengan pengalihan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Sertifikat Keselamatan Barang dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. PPN Brondong sebagai salah satu UPT pelaksana kebijakan pada Tahun 2022 telah menerbitkan sebanyak 357 dokumen SKKP sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :.

Tabel 26.
Target dan Realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	50	357	714

Tabel 27.
Perbandingan Realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Nilai)		**Selisih (+/-)**	**%**
2022	**2023**		
478	357	- 121	25,32

Tabel 28.
Perbandingan Realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (Nilai)				**Selisih (+/-)**	**%**
2020	**2021**	**2022**	**2023**		
N/A	N/A	478	81,55		

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan berupa SKKP sebanyak 357 kapal atau 715% dari target 50 kapal. Capaian ini masih dibawah capain pada Tahun 2022 sebesar 478 kapal atau turun 25,32% yaitu 121 kapal. Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa terhadap jangka menengah karena adanya perbedaan indikator. Pencapaian IKU "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" tahun 2023 didukung oleh beberapa unsur dan upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Tersedianya Personel Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan sampai dengan tahun 2023 sabanyak 6 (enam) orang;
2. Penyampaian permohonan penerbitan pembaharuan SKKP dapat dilakukan melalui Online; dan
3. Sinergitas dengan Pemerentah daerah dalam kegiatan Gerai pelayanan terpadu di lokasi sentra Nelayan atau Pelabuhan Perikanan UPT Daerah yang termasuk dalam wilayah Binaan PPN Brondong.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kapal Perikanan khusunya SKKP di PPN Brondong pada tahun 2024, maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Penambahan, penyegaran dan peningkatan kompetensi Personel Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan PPN Brondong;
2. Penambahan peralatan kerja, alat pengolah data dan perlengkapan personel Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan;
3. Perlu dilakukan Gerai pelayanan Dokumen Kapal Perikanan terpadu dengan instansi terkait secara berkala dan terjadwal pada sentra Nelayan dan/atau Pelabuhan Perikanan UPTD yang termasuk dalam wilayah Binaan PPN Brondong.

S.06 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 06. 1. Presentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)

Kompetensi Awak Kapal Perikanan yang ditingkatkan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan

dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pelaksanaan tatakelola Pengawakan Kapal Perikanan denga focus melakukan Bimtek Kecakapan Nelayan dengansasaran para Nelayan dengan Kapal ukuran sampai dengan 5 GT dengan diterbitjkan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN).

Akselerasi KKP sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan prima diwujudkan dengan menyelenggarakan Bimtek TOT untuk Instruktur dan sertifikasi Lembaga Bimtek SKN dalam upaya untuk melaksanakan Bimtek dan menerbitkan SKN bagi Nelayan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT. PPN Brondong sebagai salah Lembaga Bimtek SKN yang telah ditetapkan oleh direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun 2023 telah menerbitkan sebanyak 30 dokumen SKN sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 29.
Target dan Realisasi Presentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Presentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	90	100	111,11

Tabel 30.
Perbandingan Realisasi Presentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (%)		**Selisih (+/-)**	**%**
2022	**2023**		
N/A	100		

Tabel 31.
Perbandingan Realisasi Presentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (%)				**Selisih (+/-)**	**%**
2020	**2021**	**2022**	**2023**		
N/A	N/A	N/A	100		

Tabel 32.
Data Peserta Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Tahun 2023

No	NAMA	NIK	KET	No. STTBM
1	Hadi Siswo	3524071203740000	Lulus	001/SKN.010/VI/23
2	Karsaji	3524071207600000	Lulus	002/SKN.010/VI/23
3	Nasrul Huda	3524072005860000	Lulus	003/SKN.010/VI/23
4	Darminto	3524072707780000	Lulus	004/SKN.010/VI/23
5	Musanto	3523180202730000	Lulus	005/SKN.010/VI/23
6	Kasmat	3523180807710000	Lulus	006/SKN.010/VI/23
7	Lasmono	3524070511540000	Lulus	007/SKN.010/VI/23
8	Suharto	3523180903670000	Lulus	008/SKN.010/VI/23
9	Ahmad Ilham	3523180211890000	Lulus	009/SKN.010/VI/23
10	Purwanto	3524140701800000	Lulus	010/SKN.010/VI/23
11	Irwanto	3524140202750000	Lulus	011/SKN.010/VI/23
12	Mudakir	3524140709720000	Lulus	012/SKN.010/VI/23
13	Eet Hariyanto	3524140212980000	Lulus	013/SKN.010/VI/23
14	Sugeng	3524142005690000	Lulus	014/SKN.010/VI/23
15	Sarmadan	3524140101690010	Lulus	015/SKN.010/VI/23
16	Rifqi Wahyudi	3524140202850000	Lulus	016/SKN.010/VI/23
17	Nur Hasanudin	3524142904710000	Lulus	017/SKN.010/VI/23
18	Amin Thohari	3524141707740000	Lulus	018/SKN.010/VI/23
19	Taufiq	3524141309700000	Lulus	019/SKN.010/VI/23
20	Sujai	3524140507750000	Lulus	020/SKN.010/VI/23
21	Mugiyanto	3524070703630000	Lulus	021/SKN.010/VI/23
22	Kasmuji	3524071101520000	Lulus	022/SKN.010/VI/23
23	Farihin	3524070605780000	Lulus	023/SKN.010/VI/23
24	Niti Yono	3524070305790000	Lulus	024/SKN.010/VI/23
25	Mas'ud	3524070307790000	Lulus	025/SKN.010/VI/23
26	Kasnapun	3524072505760000	Lulus	026/SKN.010/VI/23
27	Nor Hasan	3524071205760000	Lulus	027/SKN.010/VI/23
28	Ngadiono	3523180802730000	Lulus	028/SKN.010/VI/23
29	Khoirul Anam	3524072506800000	Lulus	029/SKN.010/VI/23
30	Syaiful Amin	3524072105820000	Lulus	030/SKN.010/VI/23

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian penerbitan dokumen kapal berupa SKN sebanyak 30 dari target sebayak 30 atau presentase kinerja mencapai 100%.. Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan berdasarkan perubahan IKU PPN Brondong Tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap

periode sebelumnya maupun jangka menengah. Pencapaian tahun 2023 didukung oleh beberapa unsur dan upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Tersedianya Personel Instruktur SKN sampai dengan tahun 2023 sabanyak 2 (dua) orang.
2. Pelaksanaan fasilitasi PKL Awak Kapal Perikanan dilaksanakan dalam bentuk desiminasi dan mengundang awak kapal perikanan dan perwakilan pengusaha perikanan tangkap;
3. Sinergitas dengan BPJS maupun Pemerintah daerah dalam kegiatan fasilitasi PKL bagi Awak Kapal Perikanan yang termasuk dalam wilayah Binaan PPN Brondong.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan kompetensi dan perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di PPN Brondong pada tahun 2023, maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Penambahan, penyegaran dan peningkatan kompetensi Instruktur SKN PPN Brondong;
2. Pengadaan peralatan parktek, alat pengolah data dan perlengkapan personel Instruktur Bimtek SKN Lembaga Diklat PPN Brondong;
3. Penambahan, penyegaran dan peningkatan kompetensi petugas kesyahbandaran terutama pelayanan PKL dengan menggunakan aplikasi e PKL;
4. Pengadaan alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi PKL bagi Awak Kapal Perikanan di PPN Brondong;

S.07 Tata Kelola Pemerintah yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 07. 1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanandi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan

Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Pelaksanaan pembangunan ZI di PPN Brondong ditetapkan dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong melalui SK KPA. Pengukuran capaian kinerja IK "Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan" dengan melakukan penilaian mandiri oleh Tim dengan perpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Realiasi PM ZI di PPN Brondong pada tahun 2023 yaitu 83,69.

Tabel 33.
Target dan Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	75,07	83,69	111,48

Tabel 34.
Lembar Kerja Evaluasi PM ZI WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

LEMBAR KERJA EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DAI KORUPSI (WBK) SATKER PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG TAHUN 2023						
PENILAIAN				BOBOT	NILAI	KETERANGAN
A.	Pengungkit					
	I	Pemenuhan		30,00	23,62	
		1	Manajemen Perubahan	4,00	2,73	
		2	Penataan Laksana	3,50	2,56	
		3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,64	
		4	Penguatan Akutanbilitas	5,00	4,29	
		5	Penguatan Pengawasan	7,50	5,05	
		6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pubik	5,00	4,35	
	II	Reform		30,00	22,60	
		1	Manajemen Perubahan	4,00	3,50	
		2	Penataan Laksana	3,50	2,00	
		3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	3,50	
		4	Penguatan Akutanbilitas	5,00	4,51	
		5	Penguatan Pengawasan	7,50	6,25	
		6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pubik	5,00	2,84	
B	Hasil			40,00	37,48	
	I	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
		1	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksterna	17,50	17,02	
		2	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5,00	3,75	
	II	Pelayanan Publik yang Prima				
		1	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekst	17,50	16,71	
Nilai Akhir				100,00	83,70	

Tabel 35.
Perbandingan Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Nilai)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
89,19	83,69		

Tabel 36.
Perbandingan Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (Nilai)				Rata-Rata
2020	2021	2022	2023	
86,84	69,75	89,19	83,69	82,37

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai PM pembangunan ZI di PPN Brondong pada tahun 2023 adalah sebesar 83,69 atau 111,48% dai target 75,07. Dibandingkan dengan realisasi periode 2022, maka pada tahun 2023 realisasi IK "Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan" mengalami penurunan sebesar 5,5 atau 6,17%. Pada periode Tahun 2020-2023 nilai PM pembangunan ZI di PPN Brondong sebesar 82,37 dengan nilai terendah pada tahun 2021 dan tetringgi tahun 2022 dengan nialai 89,69. Pencapaian IK "Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan" tahun 2023 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Melakukan sinergisitas melalui kerjasama internal yang produktif dan harmonis.
2. Menanamkan nilai-nilai *core value* Bermoral (Berinovasi, Melayani, Optimis, Anti rasuah, dan akuntabel) setiap apel pagi.
3. Peran pimpinan sebagai agen perubahan.
4. Peningkatan kompetensi dan wawasan pegawai PPN Brondong tentang pelayanan publik dan komitmen tentang integritas.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan pembangunan ZI di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Pembentukan Tim dengan melibatkan semua unsur pegawai.
2. Penunjukan agen perubahan.
3. Peningkatan sarana dan prasana serta komitmen pegawai. PPN Brondong dalam implementasi nilai-nilai ZI.

IKS 07. 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Tindak lanjut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh auditan dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam LHP. Tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi/saran yang diberikan dalam LHP adalah untuk perbaikan atas kelemahan manajemen maupun untuk peningkatan kinerja satker terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Irjen KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, sebagaimana pada Pasal 20 PerMenKP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pematauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 25 PerMenKP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 disebutkan antara lain bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya. Untuk itu, semestinya, sudah menjadi kewajiban auditi, tanpa dipantau pun harus melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen KKP.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan mencapai 100% berstatus tuntas ditindaklanjuti dan dimanfaatkan evabyak 12 rekomendasi.

Tabel 37.
Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75	100	133,33

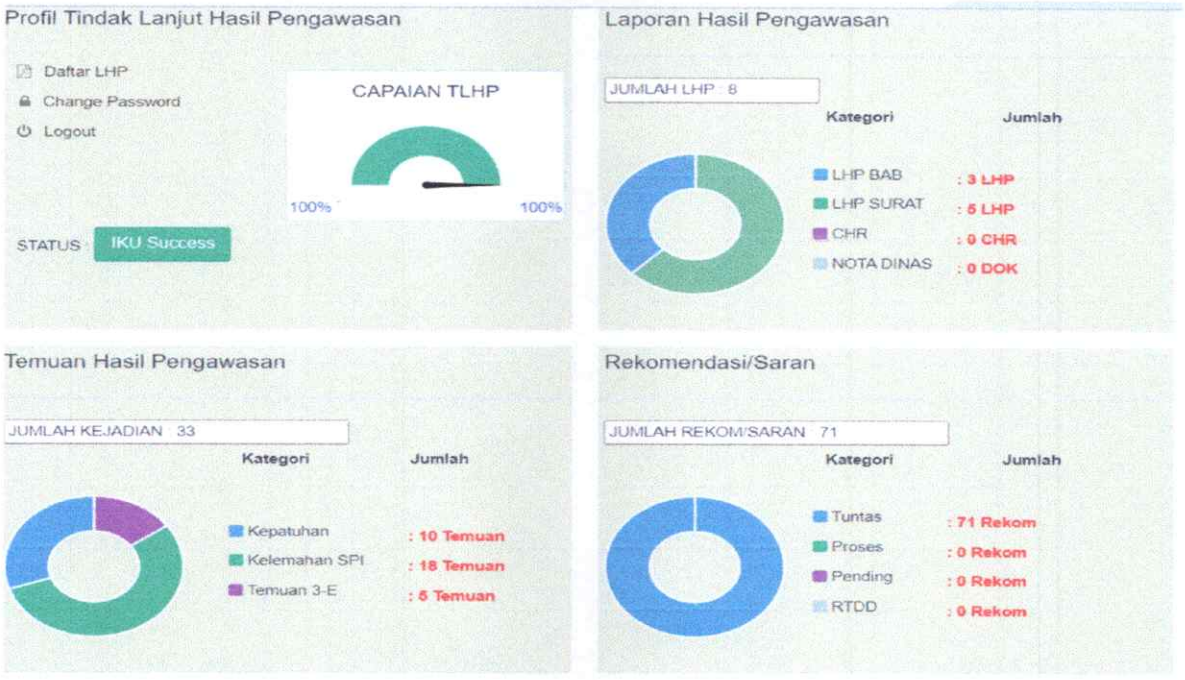

Gambar 14. Dashboard Aplikasi SIDAK

Tabel 38.
Perbandingan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (%)		**Selisih (+/-)**	**%**
2022	**2023**		
100	100	0	0

Tabel 39.
Perbandingan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (%)			
2020	**2021**	**2022**	**2023**
N/A	N/A	100	100

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pemanfaatan untuk perbaikan dari rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 adalah 100% telah dilakukan tindak lanjut perbaikan. Capaian realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Brondong adalah 100% atau 133,33% dari target 75%. Dibandingkan capaian periode sebelumnya maka capaian Tahun 2023 adalah sama yaitu 100%. Indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan periode jangka menengah karena mulai dilakukan perhitungan sejak Tahun 2022.

Pencapaian IK "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" tahun 2023 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu melakukan koordinasi secara intens secara internal dan eksternal terkait dalam menindaklanjuti terhadap rekomendasi hasil pengawasan.. Dalam mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan hasil rekomendasi hasl pengawasan di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam progres tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan..
2. Membentuk tim khusus dalam rangka percepatan penyelesaian hasil pengawasan.

IKS 07. 3. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara aknutabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang

disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan, (2) Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP pada PPN Bronodng pada Tahun 2023 didasarkan oleh SK KPA Nomor 17/PPNBR.KPA-22/KU.110/I/2023 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Kinerja, Tim Penyusun LKJ dan Tim PM SAKIP Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2022. Pengukuran kinerja SAKIP dilaksanakan menggunakan pedoman evaluasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 40.
Target dan Nilai Rekonsiliasi kinerja
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	93	98,68	106,11

Tabel 38.
Perbandingan Realisasi Rekonsiliasi kinerja
Pelabuhan Perikanan dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Nilai)		**Selisih (+/-)**	**%**
2022	**2023**		
N/A	98,68	0	0

Tabel 39.
Perbandingan Realisasi Rekonsiliasi kinerja
Pelabuhan Perikanan Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (Nilai)			
2020	**2021**	**2022**	**2023**
N/A	N/A	N/A	98,68

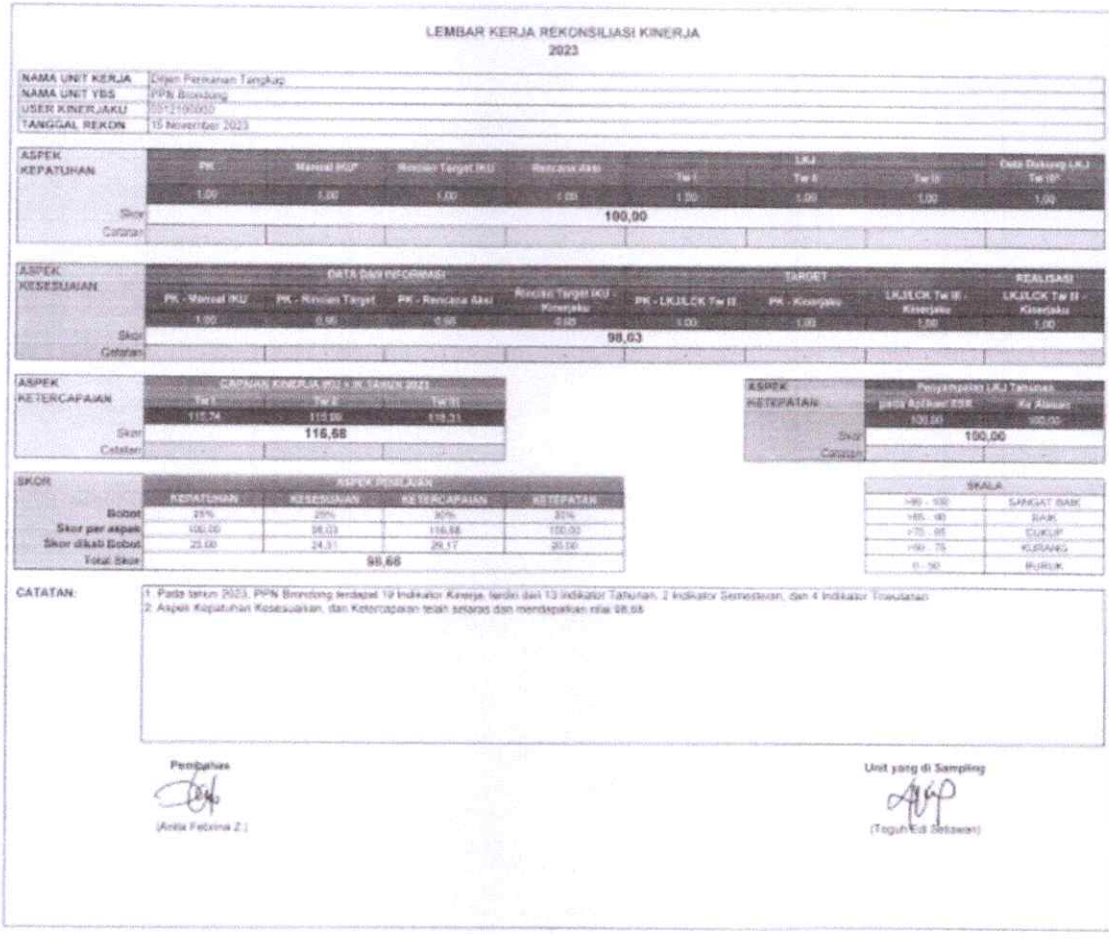

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
2023

NAMA UNIT KERJA	Dirjen Perikanan Tangkap
NAMA UNIT YBS	PPN Brondong
USER KINERJAKU	197210000
TANGGAL REKON	15 November 2023

ASPEK KEPATUHAN

PK	Manual IKU	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKU Tw I	LKU Tw II	LKU Tw III	Data Dukung LKU Tw III*
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Skor: 100,00
Catatan:

ASPEK KESESUAIAN

DATA DAN INFORMASI				TARGET		REALISASI	
PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LK/LC/LK Tw III	PK - Kinerjaku	LK/LC/LK Tw III - Kinerjaku	LK/LC/LK Tw III - Kinerjaku
1,00	0,95	0,95	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Skor: 98,63
Catatan:

ASPEK KETERCAPAIAN

CAPAIAN KINERJA IKU/K TAHUN 2023

Tw I	Tw II	Tw III
115,74	115,89	116,31

Skor: 116,68
Catatan:

ASPEK KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
100,00	100,00

Skor: 100,00
Catatan:

SKOR

ASPEK PENILAIAN

	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	98,63	116,68	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	24,31	29,17	20,00
Total Skor	98,68			

SKALA

>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>60 - 75	KURANG
0 - 60	BURUK

CATATAN:
1. Pada tahun 2023, PPN Brondong terdapat 19 Indikator Kinerja, terdiri dari 13 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 4 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98,68

Pembahas
(Anita Fekrina Z.)

Unit yang di Sampling
(Teguh Edi Setiawan)

Gambar 14. Berita Acara Rekonsiliasi Kinerja

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 98,68 atau 106,11% dari target sebesar 93. Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan berdasarkan perubahan IKU PPN Brondong Tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap periode sebelumnya maupun jangka menengah. Pencapaian tahun 2023 didukung oleh beberapa unsur dan upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Komitnen yang kuat dari Kepala Pelabuhan sekalu pimpinan unit kerja.
2. Tersedianya SDM yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan akuntabilitas di PPN Brondong.

Dalam upaya meningkatkan akutanbilitas di PPN Brondong pada tahun 2024, maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Peningkatan kompetensi petugas pengelola akuntabilitas dilingkup PPN Brondong.

2. Melakukan internalisasi kinerja akuntabilitas secara berkala kepada seluruh pegawai.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian kinerja organisasi.

IKS 07. 4. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi..

Tabel 40.
Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN
di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	80	90,94	113,67

Tabel 41.
Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (%)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
81,91	90,94	9,03	11,02

Tabel 42.
Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (%)			
2020	2021	2022	2023
67,79	81,84	81,91	90,94

Gambar 15. Dashboard IP ASN pada Ropeg KKP

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai IP ASN PPN Brondong pada tahun 2023 adalah 90,94 atau lebih besar dari target sebesar 80 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 113,67%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2022, maka pada tahun 2023 realisasi IKM "IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" mengalami kenaikan sebesar 9,03% dari capaian 2022 sebesar 81,91. Dibandingkan pada periode Tahun 2020-223, IP ASN lingkup PPN Brondong relatif Tinggi dengan nilai 80,62.

Pencapaian IK "IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" tahun 2023 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Terlaksananya diklat teknis dan seminar bagi seluruh pegawai.
2. Nilai kinerja pegawai yang baik, sehingga dapat meningkatkan nilai IP ASN

Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi nilai IP ASN di PPN

Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Melakukan sosialiasi tentang tugas dan ijin belajar kepada pegawai dalam rangka peningkatan kualifikasi.
2. Pengusulan peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, kursus dan seminar.
3. Sosialisasi kode etik ASN.

IKS 07. 5. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pegadaan barag/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku. Pengukuran berdasarkan jumlah nilai dari beberapa indikator (1) ketersediaan manajemen risiko PBJ strategis, (2) perencanaan dan persiapan pengadaan, (3. presentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE, (4) kesesuaian tahap pelaksanaan (5) laporan penyelenggaraan PBJ, dan (6) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada tahun 20223 tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di PPN Brondong sebesar 98,35.

Tabel 43.
Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77,5	98,35	126,90

No	Hasil Pembahasan	Bobot Penilaian	Nilai	Bobot Penilaian
INDIKATOR: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Eselon I				
1.	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Unit Eselon I	10%	8,35	8,35
2.	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15%	15	15
3.	Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	10%	10	10
4.	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45%	45	45
5.	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5%	5	5
6.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022	15%	15	15
			Nilai Total	98,35

Gambar 16. Lembar Kerja Evaluasi Kepatuhan PBJ

Tabel 44.
Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (%)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
98,65	98,35	- 0,30	0,30

Tabel 45.
Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (%)			
2020	2021	2022	2023
N/A	79,55	98,65	98,35

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di PPN Brondong pada tahun 2023 adalah sebanyak 98,35 atau lebih besar dari target sebesar 75 sehingga persentase capain kinerja sebesar 126,90%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2022, maka pada tahun 2023 realisasi IK "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" mengalami penurunan sebesar 0,30% dari capaian tahun 2022 sebesar 98,65. Dibandingkan capaian tahun 2021 mengalai kenaikan 18,80 dan pada tahun 2020 kepatuhan pengadaan barang/jasa tidak menjadi indikator kinerja.

Pencapaian IK "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Melakukan perencanaan terhadap pengadaan barang/jasa dengan melibatkan subkoor teknis.
2. Pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE.
3. Peningkatan SDM pengelola pengadaan barang/jasa.
4. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasa pada kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan perencanaan terhadap pengadaan barang/jasa secara akntabel.
2. Pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022.
3. Penambahan pegawai yang berkompeten melaui diklat PBJ.
4. Mengintruksikan pejabat pengadaan segera melakukan SPK terhadap barang yang akan dilakukan PBJ jika sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi.
5. Mengintruksikan pejabat pengadaan segera melakukan SPK terhadap kegiatan kontruksi yang akan dilakukan PBJ jika sudah tersedia HPS dan gambar rencana pelaksanaan.

IKS 07. 6. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup PPN Brondong merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPN Brondong dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut (1) tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN), (2) tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST, (3) tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), (4) penggunaan bmn hasil pengadaan belanja modal di dukung berita acara serah terima (BAST)/berita acara pemakaian, dan (5) penyusunan laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi

lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Brondong sebesar 85.

Tabel 46.
Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara BrondongTahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77,5	85	106,97

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Jawaban	Bobot	Nilai	Pilihan Jawaban	Kondisi/Penyebab Pencapaian Tdk Optimal	Petunjuk Penilaian	Dokumen/Data pendukung
I	**Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN**		100	85				
1	Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022		12,5	7,5				
a	Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2022	Y	5	5	Ya, jika unit kerja telah menyusun RKBMN		Penilaian dilakukan terhadap ketersediaan dokumen RKBMN Tahun 2023	Dokumen RKBMN Tahun 2023
b	Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2023	C	7,5	2,5	a. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 80% b. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 10% s.d. ≤ 50 % d. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL < 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase pengadaan dan pemeliharaan BMN dalam dokumen RKBMN Tahun 2023 yang dialokasikan anggarannya dalam RKAKL Tahun 2023	- Dokumen RKBMN Tahun 2023 - Dokumen RKAKL Tahun 2023
2	Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan II tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang	B	25	15	a. apabila prosentase usulan PSP BMN > 80% b. apabila prosentase usulan PSP BMN > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila prosentase usulan PSP BMN > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila prosentase usulan PSP BMN ≤ 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah usulan PSP BMN terhadap NUP yang belum di PSP untuk belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan II Tahun 2023. Data capaian PSP dapat diperoleh dari Biro Keuangan	- Data NUP yang belum di PSP - Data usulan PSP BMN - Data capaian PSP BMN dari Biro Keuangan
3	Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	A	25	25	a. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset > 80% b. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset ≤ 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah usulan penghapusan BMN terhadap NUP BMN dengan Kondisi Rusak Berat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Data capaian penghapusan BMN dapat diperoleh dari Biro Keuangan	- Data NUP BMN dengan kondisi Rusak Berat - Data usulan penghapusan BMN - Data capaian penghapusan BMN dari Biro Keuangan
4	Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian	A	25	25	a. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 80% b. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian ≤ 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah BMN hasil pengadaan Tahun 2023 yang telah dilengkapi BAST/Berita Acara Pemakaian BMN	- Data belanja modal Tahun 2023 - BAST/Berita Acara Pemakaian BMN perolehan Tahun 2023
5	Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu	A	12,5	12,5	a. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan Tepat Waktu b. apabila hanya Penyusunan Laporan BMN Semester I atau Tahunan Tepat Waktu c. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan tidak Tepat Waktu		- Penilaian dilakukan terhadap ketepatan waktu penyusunan/pengiriman laporan BMN Semester II Tahun 2022 dan Tahunan (TA2022) - Jadwal penyampaian mengacu pada penyampaian LK unaudited (UAPPA-E1) sesuai PMK 222 Tahun 2016: - Semesteran: 26 Januari (tahun berjalan) - Tahunan 15 Februari (tahun berikutnya)	- Laporan BMN Tahun 2022 dan Laporan BMN Semester II Tahun 2022

Gambar 17. Lembar Kerja Evaluasi Kepatuhan PBJ

Tabel 47.
Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (%)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
85	85	0	0

Tabel 48.
Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (%)			
2020	2021	2022	2023
N/A	90	85	85

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Brondong pada tahun 2023 adalah sebanyak 85 atau lebih besar dari target sebesar 75 sehingga persentase capain kinerja sebesar 113,33%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2022, maka pada tahun 2023 realisasi IK "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" masih sama dan mengalami penurunan sebesar 5,55% dari capaian tahun 2021 sebesar 90. Pada tahun 2020 kepatuhan pengelolaan BMN tidak menjadi indikator kinerja.

Pencapaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" tahun 2023 didukung terdapatnya monitoring dan evaluasi secara berkala dari eselon I dan APIP. Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Brondong pada tahun 2024, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Melakukan evaluasi secara berkala di internal PPN Brondong.
2. Peningkatan kompetensi SDM pengelola BMN.
3. Pemanfaatan data BMN sebagai bahan perencanaan pengadaan barang/jasa.

IKS 07. 7. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Indikator Kinerja Pengeloaan Keuangan (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan

ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi (1) kualitas perencanaan anggaran, (2) kualitas pelaksanaan anggaran, dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Jumah indikator kinerja yang yang dilakukan pengukuran dalam IKPA sebanya 8 (delapan) yaitu (1) revisi DIPA, (2) Deviasi halaman III DIPA, (3) data kontrak, (4) penyelesaian tagihan, (5) pengelolaan UP dan TUP, (6) dispensasi SPM, (7) penyerapan anggaran, dan (8) capaian output. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2022, nilai IKPA di PPN Brondong sebesar 95,85.

Tabel 49.
Target dan Realisasi Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	93,75	96,78	103,23

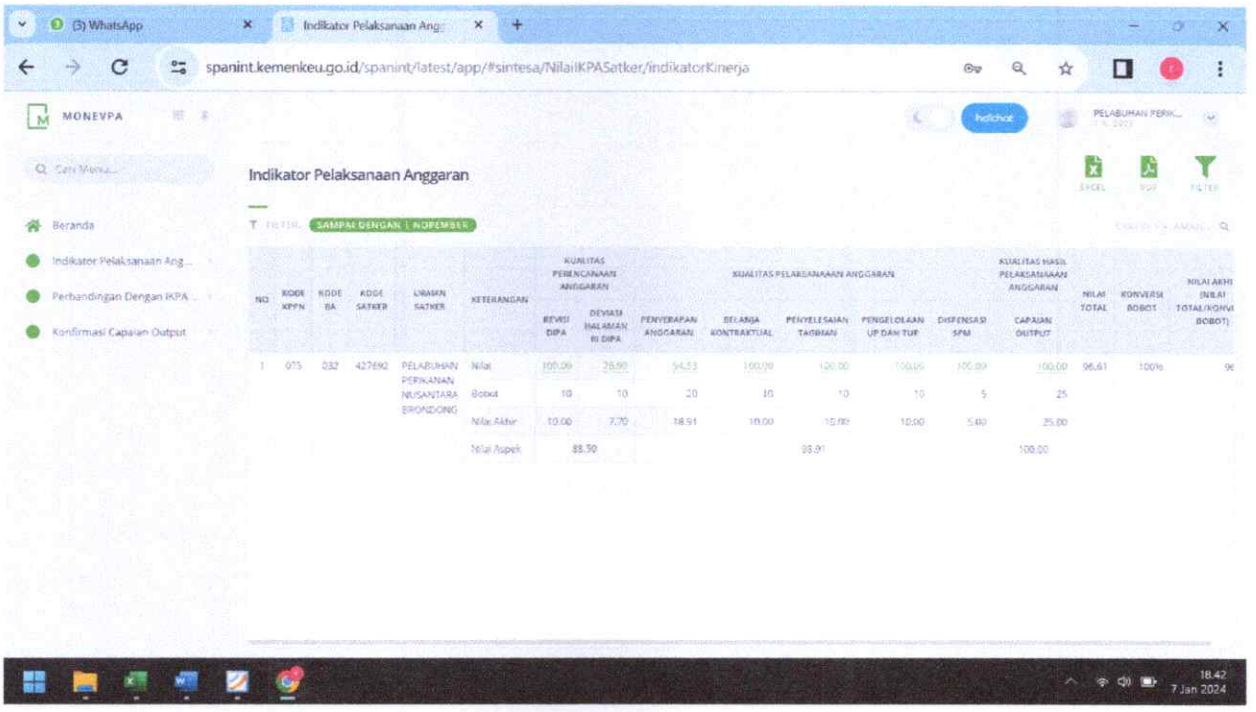

Gambar 18. Dashboard IKPA 2023

Tabel 50.
Perbandingan Realisasi Nilai IKPA dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (%)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
95,85	96,78	0,93	0,97

Tabel 51.
Perbandingan Realisasi Nilai IKPA Periode
Tahun 2020 - 2023

Realisasi (%)			
2020	2021	2022	2023
99,38	96,71	95,85	96,78

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai IKPA pada tahun 2023 adalah sebanyak 96,78 atau lebih besar dari target sebesar 93,75 sehingga persentase capain kinerja sebesar 103,23%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2022, maka pada tahun 2023 realisasi IK "Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" mengalami kenaikan sebesar 0,97% dengan realiasi nilai IKPA tahun 2022 adalah 95,85. Pada periode Tahun 2020 – 2023 nilai IKPA PPN Brondong mempunyai tren negatif dengan rata-rata penuruna 0,87 per tahun.

Pencapaian IK "Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" tahun 2023 didukung langkah operasional meningkatnya perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan kinerja. Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi nilai IKPA di PPN Brondong pada tahun 2024, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Melakukan sinergi antara perencanaan dengan pelaksanaan realisasi anggaran secara proporsional.
2. Meningkatkan koordinasi pengelola keuangan dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan 8 (delapan) indikator kinerja IKPA.

IKS 07. 8. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah

aspek implementasi yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) pencapaian keluaran, dan Efisiensi. Adapun pengelompokkan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2022, nilai kinerja anggaran di PPN Brondong sebesar 89,64 dengan kategori Baik.

Tabel 52.
Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara BrondongTahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	82	85,47	104,23

Gambar 19. Lembar Kerja Evaluasi Kepatuhan PBJ

Tabel 53.
Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (%)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
89,64	85,47	-4,17	4,65

Tabel 54.
Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (%)			
2020	2021	2022	2023
N/A	82,57	89,64	85,47

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai kinerja anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 85,47 atau lebih besar dari target sebesar 82 sehingga persentase capain kinerja sebesar 104,23%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2022, maka pada tahun 2023 realisasi IK "Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" mengalami penurunan sebesar 4,17 atau 4,65%. Pada tahun 2021 nilai kinerja anggaran sebesar 82,57 sehingga capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,9 dan pada tahun 2020 tidak menjadi indikator kinerja PPN Brondong.

Pencapaian IK "Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" tahun 2023 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Koordinasi antar anggota pengelola keuangan yang solid.
2. Pelaporan oleh petugas yang tepat waktu.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi kinerja anggaran di PPN Brondong pada tahun 2024, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Penguatan tim pengelola keuangan.
2. Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

IKS 07. 9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan

publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Tabel 55.
Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

IKS	Target	Realisasi	%
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88,21	90,92	103,87

Tabel 56.
Perbandingan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (%)		Selisih (+/-)	%
2022	2023		
N/A	90,92		

Nama Unit Pelayanan	Rating	Nilai IKM	Mutu
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	5.00	92.82	A
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	4.84	85.85	B
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	4.91	88.89	A
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	4.79	87.38	B
PPS Belawan	4.57	85.31	B
PPS Bitung	4.70	88.70	A
PPS Bungus	4.53	88.27	B
PPS Cilacap	4.90	93.19	A
PPS Kendari	4.34	85.03	B
PPS Nizam Zachman	4.76	86.19	B
PPN Ambon	4.48	87.57	B
PPN Brondong	4.71	90.92	A
PPN Karangantu	4.92	90.41	A
PPN Kejawanan	4.85	91.22	A
PPN Kwandang	4.90	92.63	A
PPN Palabuhanratu	4.81	92.88	A
PPN Pekalongan	4.79	89.70	A
PPN Pemangkat	4.58	90.89	A
PPN Pengambengan	4.66	88.94	A
PPN Prigi	4.84	90.11	A
PPN Sibolga	4.27	93.30	A
PPN Sungailiat	4.64	89.51	A
PPN Tanjungpandan	4.79	92.92	A
PPN Ternate	3.75	89.55	A
PPN Tual	5.00	88.89	A
PPP Teluk Batang	4.92	95.60	A

Gambar 20. Tangkap Layar Aplikasi Susan KKP

Tabel 57.
Perbandingan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Periode Tahun 2020 - 2023

Realisasi (%)			
2020	**2021**	**2022**	**2023**
N/A	N/A	N/A	90,92

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai survey kepuasan masyarakat di PPN Brondong sebesar 90,92 atau 103,87% dari target yang ditetapkan sebsar 88,21. Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan berdasarkan perubahan IKU PPN Brondong Tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap periode sebelumnya maupun jangka menengah.

Pencapaian IK "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" tahun 2023 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu adanya peran aktif para pengguna jasa sebagai responden dan proaktif para petugas dalam melakukan pendampingan pengisian kuisioner SKM melalui aplikasi Susan KKP. Dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian SKM yang berkualitas di PPN Brondong pada tahun 2024, maka dilakukan upaya yaitu penyusunan tim SKM lingkup PPN Brondong dan melakukan perbaikan pada pelayanan di PPN Brondong.

3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagi suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di PPN Brondong membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pada Tahun 2023 tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di PPN Brondong belum dapat diukur karena capaian realiasi anggaran yang digunakan sebagai pembanding merupakan capaian realiasi anggaran tahunan.

Tabel 58.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

Uraian	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	112,79	99,63	113,20

3.3 Realisasi Anggaran

PPN Brondong pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.16.153.666.000,- dengan realisasi belaja pada sebesar Rp. 16.094.483.330,- atau (99,63%).. Realisasi anggaran PPN Brondong pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 59.
Realiasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
2337 | Pengelolaan Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	326.200.000	322.080.088	98,74
2338 | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.745.082.000	2.727.735.752	99,37
2339 | Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	4.000.000	100
2341 | Pengelolaan Sumber Daya Ikan	178.050.000	177.965.837	99,95
2342 | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.900.334.000	12.062.701.653	99,71
Total	**16.153.666.000**	**16.094.483.330**	**99,63**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akutanbilitas Kinerja Pemerintah pada PPN Bronodng Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja PPN Bronodng dalam mencapai sasaran program dan mencerminkan sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ibrahim**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Kepala PPN Brondong
Muhammad Zaini	Ibrahim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	1.812,7
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	50.530
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	50
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	1
		5	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	30
5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang optimal	6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	83
		8	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	1
7	Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	20
8	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)	1
		11	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	160
9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	12	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (Nilai)	75,07
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75
		14	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	93
		15	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77,5
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77,5
		18	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	89
		19	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	82

Program	:	1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Rp. 3.866.368.000,- 2. Dukungan Manajemen Rp. 13.215.024.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2023	:	Rp. 17.081.392.000,-

Jakarta, 23 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Kepala PPN Brondong

Ibrahim